

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Dewiyuar Prasadha Nugraha

nugraha_dewi@rocketmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of firm size, company's year listing, dispersion ownership, profitability, leverage, commissioner board size, and audit quality on board disclosure of corporate governance. This research was a quantitative research. The population was 151 manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2013–2017. While, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. While, the data was secondary. Moreover, the data analysis technique multiple linear regression with SPSS 20.0. The research result concluded the firm size had positive effect on board disclosure of corporate governance. Likewise, dispersion ownership as well as commissioner board size had positive effect on board disclosure of corporate governance. On the other hand, company's year listing did not affect board disclosure of corporate governance. Furthermore, profitability did not affect board disclosure of corporate governance. In addition, leverage as well as audit quality did not affect board disclosure of corporate governance.

Keyword : corporate governance, affecting factor, broad disclosure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kualitas audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013–2017 sebanyak 151 perusahaan. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 46 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Kata kunci : *corporate governance*, faktor-faktor yang mempengaruhi, luas pengungkapan.

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan produksi yaitu dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan agar menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama didirikannya perusahaan untuk memperoleh laba (*profit*) yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan bagi para pendirinya. Setiap perusahaan wajib melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Hal ini disebabkan, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang ditimbulkan karena buruknya tata kelola pemerintah dan perusahaan di Indonesia yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk.

Pada pertengahan tahun 1997, isu mengenai *corporate governance* muncul setelah terjadinya krisis multidimensional. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah

terhadap dollar Amerika Serikat yang kemudian menghancurkan sendi-sendi ekonomi salah satunya pada sektor perbankan. Rendahnya transparansi di lingkungan bisnis menunjukkan bahwa lingkungan bisnis tidak transparan. Hal tersebut menyebabkan berkembangnya isu mengenai transparansi dalam *corporate governance* akan mendorong peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan aspek *corporate governance* suatu perusahaan bagi *stakeholders*.

Setelah adanya perkembangan terkait isu mengenai *corporate governance*, Indonesia memberikan tanggapan yang baik terhadap isu tersebut dengan memberikan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya *good corporate governance*. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mendirikan sebuah komite yang bernama Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999. Komite tersebut mengeluarkan pedoman *good corporate governance* pertama yang didasarkan pada Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pada tahun 2001, pedoman tersebut mengalami penyempurnaan terakhir, sehingga pada bulan November 2004 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-49/M.EKON/11/2004 komite yang didirikan pemerintah berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari *sub*-komite publik dan *sub*-komite korporasi. Pada tahun 2006 komite tersebut menghasilkan pedoman umum *good corporate governance* yang digunakan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*, termasuk rekomendasi mengenai pengungkapan praktik *good governance*.

Pengungkapan informasi secara terbuka terkait perusahaan sangat penting bagi perusahaan *go public*. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Almilia dan Retrinasari (2007:1) menyatakan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan informasi terkait perusahaan dapat membantu *stakeholders* diantaranya investor, kreditur, pemakai informasi lainnya dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang berubah.

Laporan tahunan merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan *go public* untuk menginformasikan kepada pihak luar manajemen yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan terkait dengan kondisi perusahaan dan keandalan dari informasi yang terkandung. Laporan tahunan menginformasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, karyawan, kreditor, pemasok, dan pihak lainnya yang bergantung pada pelaporan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP.134/BL/2006 perihal kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian mengenai penerapan *good governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sudah dikenal dahulu di negara-negara Eropa dan Amerika dengan konsep pemisahan antara pemegang saham dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan pihak manajemen sebagai agen. Adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen disebut dengan teori keagenan. Namun kenyataannya, dalam teori keagenan dijelaskan agen cenderung berbuat sesuai dengan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan prinsipal, sehingga memicu adanya *agency problem* karena adanya asimetri informasi. Agen memiliki kecenderungan untuk mengendalikan informasi terkait perusahaan daripada prinsipal. Hal ini disebabkan agen lebih banyak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sedangkan prinsipal sebagai

pihak yang melimpahkan tugas ke agen, sehingga tidak terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan perusahaan.

Terdapat dua penyebab terjadinya asimetri informasi yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* adalah suatu keadaan dimana agen tidak mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati bersama antara manager dengan pemegang saham, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pemegang saham dengan kreditor, pemegang saham dengan *stakeholders* lainnya. Sedangkan *adverse selection* adalah suatu keadaan dimana prinsipal tidak mengetahui apakah suatu keputusan oleh agen benar-benar bersumber dari informasi yang diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas yang diberikan.

Rini (2010:2) mendefinisikan *corporate governance* yaitu sebuah rancangan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengendalian atau pengamatan kinerja manajemen dan menjamin pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang baik akan melakukan pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan transparan sehingga dapat meningkatkan nilai bagi para *stakeholders*. Hikmah (2011:2) menyatakan bahwa jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholder* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, pengungkapan sebagai salah satu aspek *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan (Hastuti, 2005:239). Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kualitas audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, sehingga menjadikan teori tersebut sebagai sumber perusahaan untuk memahami penerapan *corporate governance* (Hamdani, 2016:30). Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa adanya pemisahan kepentingan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan. Dalam teori keagenan dapat menimbulkan konflik *agency* karena adanya pemisahan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dan juga adanya perbedaan tugas antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (*agent*), dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*.

Stakeholders Theory

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki sifat dapat mempengaruhi atau dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi, 2011:93). Para *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui segala informasi baik informasi *mandatory* maupun *voluntary*, informasi keuangan dan non keuangan (sosial). Tanggung jawab perusahaan semula hanya berfokus pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, tetapi saat ini telah bergeser menjadi lebih luas tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*) namun sudah sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial. Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan usaha sangat bergantung pada dukungan *stakeholder*.

Corporate Governance

Rompas (2014:842) mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa aktivitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan mensejahterakan para pemangku kepentingan, tidak semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) prinsip *corporate governance*

ada lima. (1) *Transparansi (transparency)*, perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan *stakeholders*. Prinsip transparansi ini tidak mengurangi komitmen untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak pribadi; (2) *Akuntabilitas (accountability)*, perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan selaras dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain; (3) *Responsibilitas (responsibility)*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpeliharanya kelangsungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*; (4) *Independensi (independency)*, perusahaan harus dikelola secara mandiri sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling menguasai dan tidak dapat diintervensi pihak lain; serta (5) *Kewajaran dan kesetaraan (fairness)*, perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, sehingga memberi kesempatan yang sama dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Ada tujuh faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*, yaitu (1) Ukuran perusahaan menjelaskan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Hormati (2009:291) menyatakan Semakin besar aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanamkan. Semakin banyak penjualan, maka semakin banyak perputaran uang yang dilakukan dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka akan semakin besar pula perusahaan tersebut diketahui oleh masyarakat; (2) Umur perusahaan menunjukkan perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan bisnis dan dapat memanfaatkan peluang bisnis dalam persaingan bisnis yang mengglobal. Perusahaan yang memiliki umur lebih lama diasumsikan akan meningkatkan praktik pengungkapannya dari waktu ke waktu karena perusahaan yang lebih lama berdiri dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya; (3) Struktur kepemilikan sendiri dibagi menjadi dua yaitu struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (*dispersi*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh pihak manajerial, sedangkan kepemilikan *dispersi* adalah kepemilikan yang dimiliki investor individu. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan *dispersi* yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi pula, karena pemilik meminta pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku manajemen dibanding dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi.

(4) *Profitabilitas* perusahaan dapat berasal dari meningkatnya sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pramono (2011:24) berpendapat semakin bertambahnya sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya; (5) *Leverage* adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Ainun dan Fuad (dalam Wicaksono, 2013:9) bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio yang rendah; (6) Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*; serta (7) Meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangannya, perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya

ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*.

Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan dapat dimanfaatkan bagi penggunaannya untuk mempertimbangkan dan melakukan pengambilan keputusan sehingga kualitas dan lingkup pengungkapan informasi yang disampaikan pada laporan tahunan sangat membantu *investor*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP.134/BL/2006 perturan X.K.6 perihal kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi *emiten* atau perusahaan publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan disebutkan :

“Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.”

Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan

Dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia (2006) bab VII mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *good corporate governance* dalam prinsip dasarnya dinyatakan bahwa :

“Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman *good corporate governance* ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana pedoman *good corporate governance* pada perusahaan tersebut telah diterapkan.”

Dalam penelitian ini, *item* pengungkapan bersumber dari pengungkapan wajib yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP/134/BL/2006 peraturan X.K.6 dan didapat dari pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Berdasarkan kebijakan dan pedoman diperoleh 16 *point item* dapat memuat *item* pengungkapan yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana sebuah perusahaan mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Governance

Ukuran sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Perusahaan besar biasanya memiliki hubungan yang kompleks dengan para pemangku kepentingan, sehingga perusahaan berupaya menyediakan informasi untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga hal ini merupakan wujud akuntabilitas manajemen kepada publik. Variabel ini sering diteliti dalam hubungan luas pengungkapan dan hasilnya berpengaruh terhadap luas pengungkapan dalam penelitian sebelumnya seperti Hikmah (2011), Rompas (2014), Wicaksono (2013), dan Fitriana (2013). Pengaruh ukuran perusahaan perusahaan dijelaskan melalui teori agensi yang mengungkapkan perusahaan besar akan semakin banyak biaya keagenan, oleh karena itu untuk mengurangi biaya keagenan perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Umur *Listing* Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan mampu bertahan, mampu bersaing, dan mampu memanfaatkan peluang bisnis. Variabel ini diteliti oleh Yularto dan Chariri (2003) dan Hikmah (2011) dengan hasil umur *listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan dalam laporan tahunan. Dengan umur yang lama, perusahaan dapat meningkatkan praktik pengungkapan karena telah berpengalaman dan lebih mengetahui kebutuhan pengguna informasi. Perusahaan yang memiliki umur lebih lama dianggap telah mempunyai banyak *stakeholders*, sehingga *stakeholders* meminta perusahaan mengungkap informasi yang detail agar mengetahui kondisi perusahaan. Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H₂ : Umur *listing* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Kepemilikan Dispersi terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Kepemilikan dispersi yaitu kepemilikan saham yang dimiliki investor individu yang tersebar. Masing-masing investor memiliki kebutuhan informasi perusahaan berbeda, sehingga perusahaan mengungkap informasi secara luas. Hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada investor. Rini (2010) berpendapat dalam teori agensi menyatakan perusahaan dengan tingkat dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi pula, karena pemilik meminta pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku manajemen dibanding dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi. Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H₃ : Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Profitabilitas dideskripsikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Profitabilitas yaitu variabel yang banyak diteliti oleh peneliti yang berhubungan dengan pengungkapan seperti Hikmah (2011), Fitriana (2013), Putranto (2013), Wicaksono (2013), dan Rompas (2014). Profitabilitas perusahaan berasal dari meningkatnya sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan disebabkan oleh meningkatnya kinerja perusahaan atau sumber dana dalam aktivitas usahanya. Meningkatnya kinerja perusahaan atau sumber dana ditandai dengan percayanya pemangku kepentingan atas sebagian kekayaan untuk disertakan dalam modal perusahaan. Pramono (2011) menyatakan pada praktiknya, meningkatnya jumlah pemangku disertai dengan pengungkapan informasi sebagai tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan. Dengan begitu, peningkatan profitabilitas akan menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan informasi *corporate governance*. Dalam penelitian ini, profitabilitas dinilai menggunakan *retun on equity* (ROE) karena ditujukan pada kepentingan pemegang saham. Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah :

H₄ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Variabel ini untuk menguji pengungkapan perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang agar meyakinkan bahwa perusahaan mempunyai sumber yang cukup untuk membiayai usaha perusahaan. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang kepentingan *principal* dan *agent* mengenai pelimpahan wewenang dengan berkurangnya biaya *monitoring*. Pelimpahan wewenang dilakukan untuk mengurangi biaya *monitoring* yang disebabkan tingginya tingkat *leverage* sehingga menyebabkan tingginya biaya *monitoring*. Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah :

H₅ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Dewan komisaris melakukan tugasnya dengan didasarkan oleh asas harus profesional; pengambilan keputusan dengan efektif, cepat, dan bertindak independen; dan memberikan nasihat dengan mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Kedudukan masing-masing dari anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama yaitu sama. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan sehingga dapat melakukan pengawasan secara efektif. Hipotesis keenam pada penelitian ini adalah :

H₆ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Kualitas audit diukur dari akuratnya informasi yang disampaikan oleh auditor. Beberapa penelitian menggunakan pengukuran kualitas audit dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) ada dua yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) kecil dan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar. Terdapat perbedaan kualitas antara Kantor Akuntan Publik (KAP) kecil dan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar. Kantor Akuntan Publik (KAP) besar mempunyai intensif yang besar untuk mengaudit lebih akurat. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien. Selain itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) kecil.

Bila kualitas audit semakin tinggi kualitasnya maka tingkat kepastian suatu perusahaan akan mengalami kegagalan kecil. Laporan keuangan harus menjelaskan informasi selengkap, seakurat, dan se jelasnya yang merupakan salah satu penerapan *good corporate governance*. Pemegang saham dalam mengambil keputusan akan melihat laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga auditor punya peran penting dalam melakukan penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan. Hipotesis ketujuh pada penelitian ini adalah :

H₇ : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian berjumlah 151 perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *non random sampling* yaitu menggunakan *Purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel untuk penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang telah dikehendaki peneliti. Adapun kriteria pengambilan sampel, sebagai berikut : (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017, (2) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2013-2017, (3) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan tahunan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2013-2017, dan (4) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba selama periode 2013-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yang diperlukan peneliti berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur, total *asset*, tanggal *listing*, kepemilikan dispersi, *Return On Equity* (ROE), jumlah dewan komisaris, kualitas audit, dan total kewajiban selama periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data

sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan galeri investasi Bursa Efek Indonesia di STESIA Surabaya.

Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Luas pengungkapan diukur dengan indeks pengungkapan *corporate governance* sebagai kriteria untuk menghitung pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Cara yang digunakan untuk mengukur indeks dengan menerapkan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai dikotomis yaitu 1 untuk *item* yang diungkapkan dan 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan (Rini, 2010:34). Berdasarkan penelitian (Bhuiyan dan Biswas, 2007:12) Indeks Pengungkapan *Corporate Governance* (IPCG) pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang mungkin diperoleh perusahaan}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan total aset yg dimiliki perusahaan. Total aset diganti dalam bentuk logaritma natural supaya nilai yang didapat tidak terlalu besar.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = L_n \text{ total aset}$$

Umur *listing* perusahaan

Umur *listing* perusahaan adalah seberapa lama perusahaan mampu beroperasi. Umur *listing* perusahaan dapat dihitung menggunakan selisih tahun pada laporan tahunan dengan tahun perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bhuiyan dan Biswas, 2007:14).

Kepemilikan dispersi

Kepemilikan saham yang tersebar oleh investor individu yang meliputi investor di luar manajemen selain pemerintah, institusi, dan kalangan keluarga.

$$\text{Kepemilikan Dispersi} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki individu}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan perusahaan. Profitabilitas dihitung menggunakan *Return On Equity* (ROE) yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang dapat diperoleh pemegang saham. Wardiyah (2017:106) menunjukkan profitabilitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

Leverage

Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) dan untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Leverage dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

$$\text{DER} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

Ukuran dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen dan komisaris (Rini, 2010:36).

Kualitas audit

Perusahaan dalam melaksanakan audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku *universal* yang dikenal dengan *Big Four World*

wide Accounting Firm (Big 4). Faktor ini diukur dengan menggunakan variabel Dummy, bila perusahaan menggunakan KAP *Big 4* diberi nilai Dummy 1 dan bila perusahaan tidak menggunakan KAP *Big 4* diberi nilai Dummy 0.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas berguna untuk menentukan model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Ghozali (2006:110) mengelompokkan cara untuk menentukan model berdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan : 1) analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal atau dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Bila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya dan 2) analisis statistik yaitu dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov (K-S) untuk menguji statistik *non-parametrik*. Pada uji K-S data dikatakan normal bila nilai sign > 0,05.

Ghozali (2006:91) menjelaskan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Untuk mengetahui ada gejala multikolinearitas yaitu dengan menentukan nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang baik jika hasil perhitungan menghasilkan nilai *Tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan. Ghozali (2006:105) menjelaskan cara untuk mengetahui ada atau tidak heteroskedastisitas dapat dilihat dari melihat grafik pola antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESSID. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Untuk mengetahui cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Santoso (2001:219) mengungkapkan secara umum dapat dijadikan acuan ada tidaknya autokorelasi jika DW diantara -2 sampai +2 maka tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Teknik regresi linier berganda yaitu analisis statistik yang menghubungkan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:157). Persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$IPCG = a + b_1SIZE + b_2ULP + b_3KDisp + b_4ROE + b_5Lev + b_6DeKom + b_7KAud + e$$

Keterangan :

IPCG : Indeks Pengungkapan *Corporate Governance*

a : Konstanta

b₁-b₇ : Koefisien regresi

SIZE : Faktor ukuran perusahaan

ULP : Faktor umur *listing* perusahaan

KDisp : Faktor kepemilikan dispersi

ROE : Faktor profitabilitas

Lev : Faktor *leverage*

DeKom : Faktor ukuran dewan komisaris

KAud : Faktor kualitas audit

e : *Standard error*

Pengujian Hipotesis

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu nol dan satu. Apabila koefisien determinasi mendekati satu menunjukkan kemampuan

variabel independen menjelaskan variabel dependen hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (Ghozali, 2006:83).

Uji kelayakan model (Uji F) dapat disebut juga uji simultan. Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersamaan mampu mempengaruhi variabel dependen (Algifari, 2015:74). Kriteria yang digunakan untuk pengujian yaitu apabila nilai sig < 0,05 maka semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya.

Uji signifikansi variabel (Uji t) dapat disebut juga uji parsial. Uji signifikansi variabel bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 2015:74). Kriteria yang digunakan untuk pengujian yaitu apabila nilai sig < 0,05 maka suatu variabel independen signifikan terhadap variabel dependennya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data yang dapat dilihat dari jumlah (*sum*), nilai terkecil (*minimum*), nilai terbesar (*maximum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasinya dari masing-masing variabel. Deskriptif dari masing-masing variabel disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPCG	230	,30	,86	,5505	,12364
Ukuran Perusahaan	230	25,62	33,32	28,5790	1,74816
Umur Listing	230	1,00	36,00	21,3696	7,40694
Kepemilikan Dispersi	230	,02	,71	,2831	,15473
Profitabilitas	230	,00	1,44	,1593	,18536
Leverages	230	,08	7,40	,8597	,92249
Dewan Komisaris	230	2,00	12,00	4,4087	2,08507
Kualitas Audit	230	,00	1,00	,4696	,50016
Valid N (listwise)	230				

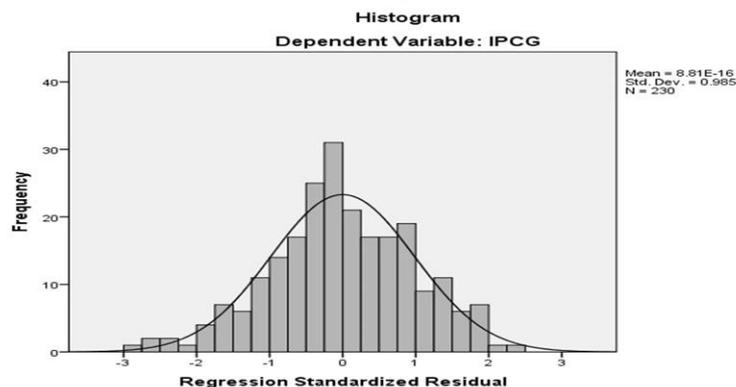
Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1 di atas, dapat diperoleh jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 230 data berdasarkan laporan tahunan selama periode 2013–2017. Pada variabel luas pengungkapan *corporate governance* (IPCG) memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,30 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 0,86. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5505 dengan standar deviasi sebesar 0,12364. Pada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 25,62 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 33,32. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,5790 dengan standar deviasi sebesar 1,74816. Pada variabel umur *listing* perusahaan memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 1,00 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 36,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,3696 dengan standar deviasi sebesar 7,40694. Pada variabel kepemilikan dispersi memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,02 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 0,71. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2831 dengan standar deviasi sebesar 0,15473. Pada variabel profitabilitas memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,00 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 1,44. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1593 dengan standar deviasi sebesar 0,18536. Pada variabel *leverage* memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,08 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 7,40. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8597 dengan standar deviasi sebesar 0,92249. Pada variabel dewan komisaris memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 2,00 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 12,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,4087 dengan standar deviasi sebesar 2,08507. Pada variabel kualitas audit memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,00 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 1,00. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4696 dengan standar deviasi sebesar 0,50016.

Uji Asumsi Klasik

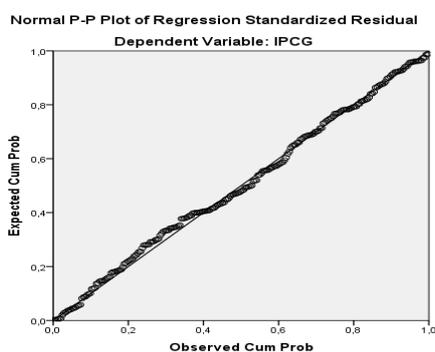
Uji normalitas

Dalam penelitian ini untuk menentukan distribusi normal atau tidak diperoleh dengan menggunakan analisis grafik (histogram dan normal *probability plot*) dan analisis statistik *non-parametrik* Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji normalitas pada penelitian ini pada Gambar 1 di bawah ini menunjukkan grafik histogram memberikan pola distribusi normal, dimana grafik tersebut berbentuk simetris tidak melenceng ke kiri atau ke kanan.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram
Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Grafik normal *probability plot* pada Gambar 2 di bawah ini, menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik normal *probability plot*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi normal.



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P - P Plot
Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Hasil uji normalitas menggunakan *one sample* Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		230
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,09517380
Most Extreme Differences	Absolute	,037
	Positive	,030
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,559
Asymp. Sig. (2-tailed)		,913

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji normalitas pada Tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,559 dengan probabilitas sebesar 0,913. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal karena nilai probabilitas lebih besar dari angka derajat kemaknaan ($\alpha = 5\%$) atau $0,913 > 0,05$.

Uji multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan ketentuan apabila memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Ukuran Perusahaan	,577	,319	,259	,471	2,122
	Umur Listing	,040	-,085	-,066	,879	1,138
	Kepemilikan Dispersi	,237	,168	,131	,874	1,145
	Profitabilitas	,147	,115	,089	,754	1,327
	Leverages	-,122	-,111	-,086	,893	1,119
	Dewan Komisaris	,528	,246	,195	,531	1,884
	Kualitas Audit	,380	-,022	-,017	,537	1,863

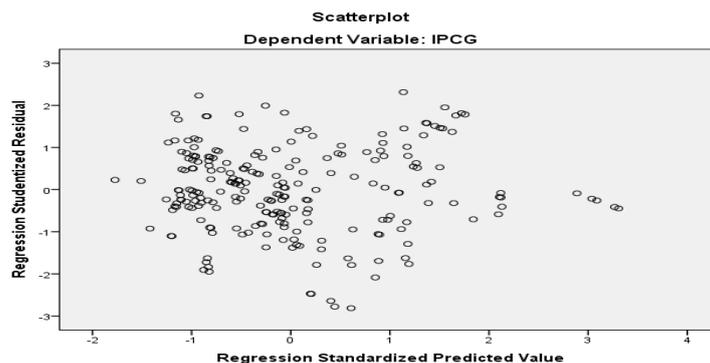
a. Dependent Variable: IPCG

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 di atas, diketahui semua variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga tidak ada korelasi antar variabel independen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi terbebas dari multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variabel residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot
Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 3 di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji autokorelasi

Model regresi yang baik yaitu terbebas dari autokorelasi. Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian menggunakan Uji Durbin Watson (DW Test) dengan ketentuan yaitu jika nilai DW diantara -2 sampai +2 maka tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,638 ^a	,407	,389	,09666	1,685

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Dispersi, Umur Listing, Leverages , Profitabilitas , Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan
b. Dependent Variable: IPCG

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji autokorelasi pada Tabel 4 di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,685. Nilai Durbin Watson berada -2 dan 2 yang digambarkan bahwa -2 < 1,685 < 2 sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-,288	,138		-2,086	,038
	Ukuran Perusahaan	,027	,005	,378	5,021	,000
	Umur Listing	-,001	,001	-,070	-1,274	,204
	Kepemilikan Dispersi	,112	,044	,140	2,535	,012
	Profitabilitas	,068	,040	,102	1,722	,087
	Leverages	-,012	,007	-,091	-1,671	,096
	Dewan Komisaris	,016	,004	,268	3,781	,000
	Kualitas Audit	-,006	,017	-,023	-,329	,743

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari Tabel 5 di atas, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
 $IPCG = - 0,288 + 0,027SIZE - 0,001ULP + 0,112KDisp + 0,068ROE - 0,012Lev + 0,016DeKom - 0,006KAud + e$

Pengujian Hipotesis

Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,638 ^a	,407	,389	,09666	1,685

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Dispersi, Umur Listing, Leverages , Profitabilitas , Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: IPCG

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,389. Hal ini menunjukkan bahwa 38,9% variasi luas pengungkapan *corporate governance* (IPCG) dapat dijelaskan oleh variasi dari ketujuh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan kualitas audit sedangkan sisanya 61,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan dengan melihat signifikansi F pada hasil output dengan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil uji kelayakan model ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,427	7	,204	21,811	,000 ^b
	Residual	2,074	222	,009		
	Total	3,501	229			

a. Dependent Variable: IPCG

b. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Dispersi, Umur Listing, Leverages , Profitabilitas , Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji kelayakan model pada Tabel 7 di atas, diketahui bahwa F hitung sebesar 21,811 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi luas pengungkapan *corporate governance* (IPCG) atau bisa dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji signifikansi variabel (Uji t)

Uji t dilakukan dengan dengan melihat signifikansi t masing - masing variabel pada hasil output dengan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil uji signifikansi variabel ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi Variabel (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,288	,138		-2,086	,038
Ukuran Perusahaan	,027	,005	,378	5,021	,000
Umur Listing	-,001	,001	-,070	-1,274	,204
Kepemilikan Dispersi	,112	,044	,140	2,535	,012
Profitabilitas	,068	,040	,102	1,722	,087
Leverages	-,012	,007	-,091	-1,671	,096
Dewan Komisaris	,016	,004	,268	3,781	,000
Kualitas Audit	-,006	,017	-,023	-,329	,743

Sumber : data sekunder (diolah), 2019

Dari hasil uji signifikansi variabel pada Tabel 8 di atas, menunjukkan sebagai berikut : (1) Pada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 5,021 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima karena ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*; (2) Pada variabel umur *listing* perusahaan memiliki t hitung sebesar -1,274 dan nilai signifikansi sebesar 0,204. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka H_2 ditolak karena umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*; (3) Pada variabel kepemilikan dispersi memiliki t hitung sebesar 2,535 dan nilai signifikansi sebesar 0,012. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima karena kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

(4) Pada variabel profitabilitas memiliki t hitung sebesar 1,722 dan nilai signifikansi sebesar 0,087. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka H_4 ditolak karena profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*; (5) Pada variabel *leverage* memiliki t hitung sebesar -1,671 dan nilai signifikansi sebesar 0,096. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka H_5 ditolak karena *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*; (6) Pada variabel ukuran dewan komisaris memiliki t hitung sebesar 3,781 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka H_6 diterima karena ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*; serta (7) Pada variabel kualitas audit memiliki t hitung sebesar -0,329 dan nilai signifikansi sebesar 0,743. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka H_7 ditolak karena kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji ukuran perusahaan diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka pengungkapan informasi perusahaan semakin luas oleh pihak manajemen karena untuk mengurangi biaya keagenan dan mewujudkan akuntabilitas publik.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari total aktiva perusahaan. Bila perusahaan mempunyai aktiva yang besar dimungkinkan melakukan pengungkapan lebih luas karena perusahaan besar tidak lepas dari tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan pengungkapan informasi perusahaan. Perusahaan besar cenderung mendapat tekanan oleh publik sehingga perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai upaya perwujudan akuntabilitas publik.

Ukuran perusahaan dapat dihubungkan dengan teori keagenan yang menjelaskan terdapat konflik kepentingan antara agen dan prinsipal karena kemungkinan agen tidak

selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal sehingga menimbulkan biaya keagenan. Pada perusahaan besar cenderung mempunyai biaya keagenan lebih besar dibanding perusahaan kecil sehingga pengungkapan informasi yang lebih luas diharapkan mampu mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007), Hikmah (2011), Hormati (2009), Rompas (2014), dan Wicaksono (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Umur *listing* Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji umur *listing* perusahaan diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,204. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat menunjukkan bahwa umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat nilai IPCG dan umur perusahaan, sebagai contoh pada perusahaan Trisula International, Tbk yang berumur 1 tahun mempunyai nilai IPCG sebesar 0,51 sedangkan pada perusahaan Delta Djakarta, Tbk yang berumur 29 tahun mempunyai nilai IPCG sebesar 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan umur yang tua melakukan pengungkapan *corporate governance* sedikit sedangkan perusahaan dengan umur yang muda melakukan pengungkapan *corporate governance* secara luas. Hal ini dikarenakan semakin tua perusahaan akan membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut, sehingga perusahaan menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengungkapan informasi.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007), Fitriana (2013), Rini (2010), dan Wicaksono (2013) membuktikan bahwa umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Kepemilikan Dispersi terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji kepemilikan dispersi diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,012. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat menunjukkan bahwa kepemilikan dispersi memberikan pengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan dispersi maka perusahaan akan melakukan pengungkapan yang tinggi karena adanya dorongan publik untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham yang dimiliki investor di luar manajemen selain pemerintah, institusi, dan kalangan keluarga. Kepemilikan dispersi mencerminkan tingkat kepemilikan saham oleh masyarakat umum. Na'im dan Fuad (dalam Kartika dan Hersugondo, 2009:51) menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki masyarakat yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan sehingga banyak poin yang harus diuraikan dengan begitu pengungkapan perusahaan semakin luas. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Putranto (2013) dan Wicaksono (2013) membuktikan bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji profitabilitas diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,087. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) maka dapat menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini disebabkan karena keterbukaan informasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh investor untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Safitri (dalam Pramono, 2011) menjelaskan kepercayaan dapat meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya modal. Kusumawati (2006) menyatakan bila pengungkapan dapat mengurangi biaya modal melalui biaya pengumpulan yang dilakukan investor, sehingga pengurangan biaya tersebut dapat

meningkatkan keinginan untuk investor berinvestasi di perusahaan tersebut oleh karena itu kinerja perusahaan termasuk profitabilitas tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan. Apabila perusahaan mengalami penurunan profitabilitas maka perusahaan cenderung memberikan informasi tentang perusahaan untuk menutupi hal yang dapat membuat nilai perusahaan buruk di mata investor sehingga dapat menghadapi tekanan pasar dan meyakinkan pasar akan kinerja perusahaan di periode mendatang.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Fitriana (2013), Hikmah (2011), Natalia dan Zulaikha (2012), Pramono (2011), Putranto (2013), dan Wicaksono (2013) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji *leverage* diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,096. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) maka dapat menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini diterangkan bila *leverage* tinggi maka menunjukkan kinerja keuangan perusahaan buruk sehingga menyebabkan ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mempunyai risiko yang tinggi juga, oleh karena itu pihak manajemen mengurangi pengungkapan *corporate governance* yang membuat kreditor ragu dalam memberikan pinjaman. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Darmawati (2006), Hormati (2009), Natalia dan Zulaikha (2012), Pramono (2011), Wicaksono (2013), dan Yularto dan Chariri (2003) membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji ukuran dewan komisaris diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam perusahaan akan memudahkan dalam pengawasan.

Ukuran dewan komisaris dapat dihubungkan dengan teori keagenan karena dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian tertinggi yang mempunyai tugas untuk memantau tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Kedudukan masing-masing dari anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama yaitu sama. Dewan komisaris melaksanakan tugasnya harus profesional sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan harus bisa mengambil keputusan dengan efektif, cepat, dan dapat bertindak independen. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Hikmah (2011) dan Putranto (2013) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Berdasarkan hasil uji kualitas audit diketahui bahwa nilai sign sebesar 0,743. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Kebanyakan perusahaan akan menggunakan jasa KAP yang berkualitas untuk meningkatkan laporan keuangan yang kredibilitas dan informatif. Padahal, Semakin berkualitas hasil audit belum tentu semakin baik pula kualitas penerapan *corporate governance* (Putranto, 2013).

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Muhamad (2009) dan Putranto (2013) membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka pengungkapan informasi perusahaan semakin luas oleh pihak manajemen karena untuk mengurangi biaya keagenan dan mewujudkan akuntabilitas publik; (2) Umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dapat dikarenakan semakin tua perusahaan akan membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut, sehingga perusahaan perlu menekan biaya untuk keperluan pengungkapan informasi; (3) Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan dispersi maka perusahaan akan melakukan pengungkapan yang tinggi karena adanya dorongan publik untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat mereka berinvestasi; (4) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dapat dikarenakan keterbukaan informasi yang dibutuhkan investor untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sedangkan kepercayaan dapat meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya modal; (5) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dapat dikarenakan jika *leverage* tinggi maka menunjukkan kinerja keuangan perusahaan buruk sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi maka tingkat risiko yang tinggi juga sehingga manajemen perusahaan mengurangi pengungkapan *corporate governance* agar membuat kreditor ragu; (6) Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam perusahaan akan memudahkan dalam pengawasan; dan (7) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. perusahaan yang menggunakan jasa *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)* belum tentu akan mengungkapkan *corporate governance* yang luas.

Saran

Dari penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan guna mengembangkan penelitian selanjutnya sebagai berikut : (1) Perusahaan sebaiknya memperluas informasi *corporate governance* sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan agar informasi yang diungkapkan relevan bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan; (2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel yang lebih banyak atau mengganti variabel yang tidak signifikan dari penelitian ini dengan variabel lain yang dapat memberikan hasil yang signifikan; dan (3) Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data yang lebih banyak dengan rentang waktu yang lebih lama agar memperoleh hasil yang akurat.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan masih terdapat keterbatasan penelitian sebagai berikut : (1) Jumlah sampel yang digunakan penelitian terbatas yaitu hanya 46 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari 151 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (2) Periode penelitian terbatas pada periode 2013-2017, sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan untuk periode yang lain; dan (3) Perusahaan dalam penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur, sehingga kurang dapat digeneralisasikan untuk jenis perusahaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2015. *Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Almilia, L. S. dan I. Retrinasari. 2007. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional*. 9 Juni. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta: 1-16.
- Bhuiyan, Md. H.U. dan P. K. Biswas. 2007. Corporate Governance and Reporting : An Empirical Study of the Listed Company in Bangladesh. *Journal of Business Studies XXVIII* (1): 1-32.
- Darmawati, D. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. 23-26 Agustus: 1-23.
- Fitriana, E. U. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing Perusahaan, Kepemilikan Dispersi, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Corporate Governance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2009-2011). *Naskah Publikasi*: 1-16.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance : Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Hastuti, T. D. 2005. Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*. 15-16 September: 238-247.
- Hikmah, N., Chairina, dan D. Rahmayanti. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Akuntansi XIV Aceh*. 21-22 Juli: 1-32.
- Hormati, A. 2009. Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 13(2): 288-298.
- Kartika, A dan Hersugondo. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Eksplanasi* 4(7): 44-59.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-134/BL/2006. *Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik*. 7 Desember 2006. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jakarta.
- Kusumawati, D. N. 2006. Profitability And Corporate Governance Disclosure: An Indonesian Study. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. 23-26 Agustus: 1-19.
- Lupiyoadi, R. dan R. B. Ikhsan. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Muhamad, R. 2009. Disclosure Quality on Governance Issues in Annual Reports of Malaysian PLCs. *International Business Research* 2(4): 1-12.
- Natalia, P. dan Zulaikha. 2012. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia). *Diponegoro Journal of a Accounting* 1(2): 1-10.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Tahun 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. 17 Oktober 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta.
- Pramono, F. A. 2011. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Governance pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Putranto, R. J. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2011. *Diponegoro Journal of a Accounting* 2(2): 1-12.
- Rini, A. K. 2010. Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rompas, R., V. Ilat, dan A. T. Poputra. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance pada Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA* 2(3): 841-852.
- Santoso, S. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Wardiyah, M. L. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Wicaksono, N. A. N. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2008 - 2010). *Naskah Publikasi*: 1-20.
- Yularto, P. A. dan A. Chariri. 2003. Analisis Perbandingan Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum Krisis dan pada Periode Krisis. *Jurnal Maksi* 2: 1-21.